**ABSTRAK**

ANSYAR. *Peranan Pemerintah Kota Makassar Terhadap Perlakuan Khusus Bagi Anak-Anak Dan Manusia Usia Lanjut Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Tesis (dibimbing oleh Heri Tahir dan Manan Sailan)

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai (1) Penerapan perlakuan khusus bagi anak-anak dan manusia usia lanjut di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Makassar dalam upaya melaksanakan perlakuan khusus bagi anak-anak dan manusia usia lanjut di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam penelitian kulitatif ini menggunakan “*social Situation”* atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place)*, pelaku (a*ctor)s*, dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Adapun obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Pejabat bagian Hukum dan HAM Balaikota Makassar, Pejabat Dinas Perhubungan bagian lalu lintas dan angkutan jalan, Anggota SAT LANTAS POLRESTABES Makassar, Supir Bus Sekolah, Anak Sekolah, dan Manusia Usia Lanjut. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Perlakuan khusus bagi anak-anak dan manusia usia lanjut di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Makassar belum terlaksana secara maksimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jangkutan Jalan, pasal 242 ayat 1 dan 2.Kerena masih banyaknya keluhan dari anak-anak dan manusia usia lanjut yang merasa takut ketika menyeberangi jalan. Sementara jumlah penduduk yang tergolong anak-anak dan manusia usia lanjut mencapai 603.469 atau sekitar 44% penduduk kota Makassar. (2) Kendala pemerintah kota Makassar dalam membuat peraturan daerah tentang perlakuan khusus bagi anak-anak dan manusia usia lanjut di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu banyaknya peraturan daerah yang perlu diselasaikan oleh pemerintah kota Makassar. Dalam hal prioritas pelayanan yaitu kurangnya sosialisasi dan pengawasan serta pendampingan yang tidak berkelanjutan. Sementara dalam hal fasilitas pelayanan terkendala dengan masalah anggaran, sehingga perlakuan khusus bagi anak-anak dan manusia usia lanjut di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Makassar tidak berjalan sesuai ketentuan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 242 ayat 1 dan 2.

**ABSTRACT**

ANSYAR. 2015. *The Role of Makassar City Government towards Special Treatment to Children and Elderly People in Traffic and Road Transportation* (supervised by Heri Tahir and Manan Sailan).

The research was desecriptive qualitative which aimed to provide desecption and explanation on (1) the implementation of special treatment toward children and elderly people in traffic and road transportation, (2) the constraints faced by Makassar City government in implementing special treatment toward children and elderly people in traffic and road transportation.

The qualitative research employed social situation which consisted of three elements, namely: place, actor, and activity which interacted in synergy. The objects of the research were Makassar City’s Law and Human Right Officials, Department of Transportation official in traffic and road transportation section, Makassar City’s Police Traffic Unit Members, School Bus Drivers, Studens, and Elderly People. The data of the research was collected by using observation, interview, and documentation.

The result of the research showed that (1) The special treatment to children and elderly people in the traffic and road transportation in Makassar City was not maximally implemented as stated in Constitution Number 22 year 2009 about traffic and road transportation in Article 242 Paragraph 1 and 2 because there were still many complaints from the children and elderly people who felt afraid to cross the road. While the number of people who classified as children and elderly people reached 603.469 or about 44% of Makassar City’s population, (2)the constraint of Makassar City government in making local regulation about special treatment to children and elderly people in the field of traffic and road transportation was the number of local government which had to be finished by Makassar City government. In term of service priority, it was lack of socialization and supervision and unsustainable mentoring. The service facility constrained by budget problem so the special treatment to children and elderly people in traffic and road transportation in Makassar City was not implemented according to the provision which had been mandated in Indonesian Republic Constitution number 22 year 2009 about traffic and road transportation in Article 242 paragraph 1 and 2.